



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR QUDUS**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **263352**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.035.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/162 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah Seluas 604 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah Seluas 393 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 216.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000



4. MOBIL, XPANDER MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.165.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	400.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	718.198.772
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.534.198.772
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.534.198.772

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.